

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PROSES PEMBERIAN KREDIT DALAM RANGKA MENJAGA KUALITAS KREDIT YANG DIBERIKAN (STUDI KASUS PADA PT.BPR MULTI PARAMINDO ABADI)

Jurnal
Furqon Imam Satria
S-1 Akuntansi STIE Indonesia Banking School

Dosen Pembimbing
Sparta, SE, AK.MSi

ABSTRACT

This research is focused Internal controls in accounting information systems process credit PT.BPR Multi Paramindo Abadi. The purpose of this study to achieve three main objectives: 1) understand the implementation of internal control in accounting information systems process credit, 2) to compare the internal control with prevailing theory, and 3) to determine the role of internal control in maintaining credit quality.

The research method used was qualitative analytical descriptive method, which collects data in accordance with the fact that there was to later be analyzed and interpreted the data and facts obtained so that it can be made a conclusion and suggestion.

The results is shown that Internal controls in accounting information systems process credit PT.BPR Multi Paramindo Abadi has not been started in accordance with the prevailing theory, because the marketing department that the main job is selling the bank's product such as savings, deposits and credit, their also given another responsibilities, their assigned to analyse the credit applications. This allows have the risk to the result credits, and it can't used to minimize the credit risk. The result shows that the implementation of internal control in accounting information systems process credit PT.BPR Multi Paramindo Abadi in the period of 2007-2010 has not been able to maintain the quality of credit

Keywords: credit, quality, internal control in accounting information systems.

I.Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Disamping itu, perbankan merupakan alat sangat penting dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.

Definisi bank menurut undang-undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No.10 Tahun 1998). Definisi lain bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana kelompok masyarakat yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan dana tersebut (Syarif Arbi 2003:5).

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai $\pm 70\%$ dari volume usaha bank (Zaini widya:2009). Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga (*provisi*). Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besaran pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat (Dahlan Siamat 2005:349).

Namun dalam memberikan kredit bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah karena dalam pemberian kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro yang berjangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastiaan atau resiko atas kredit yang diberikan sehingga dapat berpotensi meningkatkan *Non Performing Loan* (NPL).

Untuk itu, didalam perbankan sangat dibutuhkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas dalam proses dan prosedur pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah PT.BPR Multi Paramindo Abadi, yang memiliki pertumbuhan kredit pada tahun 2010 sebesar Rp3.142.347.000 yang terdiri dari kredit yang diberikan kepada pihak terkait sebesar Rp58.195.000 dan kredit yang diberikan kepada pihak tidak terkait sebesar Rp3.084.152.000, kemudian terjadi peningkatan bunga pada tahun tersebut sebesar Rp820.552.000. Seiring pertumbuhan kredit dan tingkat bunga yang diperoleh oleh PT. BPR Multi Paramindo Abadi, terjadi peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) yang cukup signifikan pada tahun tersebut sebesar 32,59%, tingkat NPL ini sangat melampaui peraturan yang dibuat oleh BI selaku bank central mengenai besarnya tingkat *Non Performing Loan* yang harus dipenuhi oleh seluruh bank diindonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai penerapan audit internal pada PT. BPR Multi Paramindo Abadi. Alasan penulis memilih PT BPR Multi Paramindo Abadi adalah karena PT BPR Multi Paramindo Abadi merupakan bank yang memiliki nilai NPL lebih besar dari nilai NPL yang telah ditetapkan oleh BI selaku bank *Central* yang seharusnya dipenuhi perbankan di seluruh Indonesia, sehingga penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana

penerapan pengendalian internal dalam proses pemberian kredit tersebut dengan judul :
“Analisis Pengendalian Internal Pada Sistem Informasi Akuntansi Proses Pemberian Kredit Dalam Rangka Menjaga Kualitas Kredit Yang Diberikan (Studi Kasus Pada PT. BPR Multi Paramindo Abadi)”.

1.2 Perumusan Masalah

1) Identifikasi Masalah

Pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit sangat diperlukan guna terciptanya kegiatan bank yang sesuai dengan prosedur dan menghindari terjadinya penyimpangan dan resiko yang dapat timbul dalam pemberian kredit.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi, apakah pengendalian internal telah dilaksanakan secara sesuai dengan teori yang ada, serta bagaimana penerapan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit dapat menjaga kualitas kredit yang diberikan.

2) Batasan Masalah

Penelitian mengenai pengendalian internal pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi ini hanya mencakup pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit yang dilakukan PT.BPR Multi Paramindo Abadi, Periode yang digunakan peneliti adalah tahun 2007-2010.

3) Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit pada PT BPR Multi Paramindo Abadi ?
2. Apakah pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit pada PT BPR Multi Paramindo Abadi telah sesuai dengan teori yang ada ?
3. Bagaimana peranan pengendalian internal dalam rangka menjaga kualitas kredit yang diberikan pada PT BPR Multi Paramindo Abadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit pada PT BPR Multi Paramindo Abadi.
2. Apakah pengendalian internal atas prosedur kredit pada PT BPR Multi Paramindo Abadi telah sesuai dengan teori yang ada.
3. Mengetahui peranan pengendalian internal dalam rangka menjaga kualitas kredit yang diberikan pada PT BPR Multi Paramindo Abadi.

II.Landasan Teori

2.1.Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Bank

Bank berasal dari kata italiano *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Syarif Arbi (2003:5).

Menurut Syarif Arbi (2003:5) “Bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana kelompok masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkan kepada

kelompok masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan dana tersebut”.

Pengertian bank menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (UU No.10 tahun 1998)”.

2.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2007:322) jenisnya, bank berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua berikut ini.

a. Bank Umum

“Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan lemah/kecil, pengembangan ekspor nonmigas, pengembangan pembangunan perumahan, dan lain-lain”.

b. Bank Perkreditan rakyat

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu”.

2.3 Pengertian Kredit

Sebenarnya kata “kredit” berasal dari bahasa romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur), karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan (Gatot 2009:152).

Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (UU nomor 10 tahun 1998)”.

Menurut Gatot (2009:153) Dengan mendasarkan pengertian Undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan dengan imbalan berupa bunga.

2.3.1 Jenis Kredit

Dahlan Siamat (2005:349), mengemukakan penggolongan kredit berdasarkan:

1) Jangka waktu (*maturity*)

Penggolongan kredit menurut jangka waktu dapat dibedakan:

a. Kredit jangka pendek (*short term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun, misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan, termasuk modal kerja.

b. Kredit jangka menengah (*medium term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja, misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi.

c. Kredit jangka panjang (*long term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha dan rehabilitasi.

2) Barang jaminan (*collateral*)

Dilihat dari barang jaminan, kredit dapat dibedakan:

a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*).

b. Kredit dengan tanpa jaminan (*unsecured loan*).

3) Segmen Usaha

Sektor industri yang dibiayai oleh bank biasanya dibagi lagi menjadi segmen-segmen usaha, misalnya: perdagangan, otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi, dan sebagainya.

4) Tujuan Kredit

Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya yaitu:

a. Kredit komersil (*commercial loan*)

Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain: kredit levereansir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor, dan sebagainya.

b. Kredit konsumtif (*consumer loan*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang sifatnya konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba, akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya membeli properti (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.

c. Kredit produktif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran, distribusi, dan sebagainya.

5) Penggunaan Kredit

Penggolongan kredit menurut penggunaannya terdiri atas :

a. Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal

kerja untuk tujuan komersial, industri, kontraktor bangunan dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku (kemudian diproses menjadi barang jadi) lalu dijual (bisa dengan kredit atau tunai) selanjutnya memperoleh uang kas kembali.

b. Kredit investasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk berinvestasi dengan membeli barang-barang modal.

Kredit ini termasuk ke dalam kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Yang dimaksudkan untuk membiayai barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, relokasi, dan pendirian proyek baru.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Cara yang dipergunakan oleh suatu bank dalam mengurangi resiko kredit adalah dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap calon nasabah yang akan diberikan kredit. Analisa 5C menurut Suhardjono Mudrajat Kuncoro (2002: 75)

1) *Character*

Pada dasarnya menunjukkan bagaimana karakter calon nasabah yang akan diberi kredit. Dalam analisis karakter nasabah, yang perlu diperhatikan terutama adalah pengalaman calon nasabah mengelola perusahaan, kejujuran dan kepiawaian, perkembangan usaha yang bersangkutan, lamanya perusahaan tersebut berdiri, dan sebagainya.

2) *Capital*

Menitikberatkan pada aspek permodalan calon nasabah. Yang perlu dianalisis dalam hal ini adalah pengsa (share) modal yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah biasanya modal sendiri yang harus disediakan calon nasabah dipersyaratkan oleh bank minimal sebesar 30% dari keseluruhan kebutuhan dana untuk pembiayaan.

3) *Collateral*

Merupakan agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. Aspek yang perlu dianalisis adalah jaminan dari kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dalam UU perbankan jaminan tersebut dapat berupa hanya obyek usaha yang dibiayai (*first best wayout*), namun demikian bank dapat meminta tambahan jaminan berupa tanah atau rumah milik calon nasabah (*second best wayout*)

4) *Capacity*

Adalah kepastian atau kemampuan pihak penerima kredit untuk membayar bunga dan cicilan kredit. Aspek yang perlu dianalisis adalah kemampuan usaha tersebut untuk memproduksi dan memasarkan hasil-hasilnya sesuai dengan proyeksi yang dituangkan dalam proposal permohonan kredit.

5) *Condition of economy*

Merupakan kondisi perekonomian pada saat kredit dikucurkan. Aspek yang perlu dianalisis adalah persaingan di pasar dari hasil produksi usaha tersebut serta kecenderungan perkembangan ekonomi di masa mendatang atas barang yang dihasilkan usaha tersebut.

Prinsip 5P menurut rachmat firdaus dan Maya Arianti (2003:88)

1) *Party*

Yang dimaksud party disini ialah mencoba menggolongkan calon peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capitalnya dengan jalan penilaian atas ke 3C tersebut

2) *Purpose*

Yang dimaksud dengan *purpose* ini ialah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (*real purpose*) dari kredit tersebut apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. Bagaimana *backward linkage* (keterkaitan keulu) dan *forward linkage* (keterkaitan kehilir). Selanjutnya juga sebagai kreditur, maka bank harus meneliti apakah kreditnya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula.

3) *Payment*

Setelah mengetahui *real purpose* dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai/dihasilkan. Dengan demikian bank dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya, sekaligus juga dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian kreditnya.

4) *Profitability*

Yang dimaksud *profitability* disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank, andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak memberikan kredit sama sekali.

5) *Protection*

Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya anatara lain dengan jalan meminta *collateral*/jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya maupun kreditnya diasuransikan.

Menurut Arbi prinsip 3R adalah sebagai berikut (2003:128)

1). *Returns* (Hasil Yang Dicapai)

Suatu estimasi/dugaan yang memperkirakan tentang hasil yang akan diperoleh oleh suatu calon debitur dari usahanya, sejauh mana dari hasil usaha calon debitur dapat untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok kredit.

2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Penaksiran/peramalan atas kemampuan membayar kembali calon debitur atas kredit yang diberikan baik dari sumber usaha calon debitur maupun dari sumber lainnya sehingga dapat dibuat penjadwalan. Untuk kredit dengan tujuan produktif baik modal kerja maupun investasi, sumber pembayaran adalah dari kegiatan usaha yang dibiayai, sedangkan untuk kredit konsumtif sumber *repayment* adalah berasal dari penghasilan calon debitur dari sumber lain.

- 3) *Risk of bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko) dalam hal terjadinya suatu kegagalan yang tidak dapat diduga, apakah calon debitur mempunyai kesanggupan untuk menanggung resiko. Apakah calon debitur sanggup menutup kerugian yang mungkin timbul. Untuk berjaga-jaga akan kerugian yang tidak diduga tersebut apakah agunan telah ditutup asuransi, atau bila perlu kredit juga ditutup dengan asuransi.

2.3.3 Kualitas Kredit

Menurut Mahmoeddin (2003: 43) penggolong kualitas kredit sebagai berikut :

1. Kredit Lancar
Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
2. Kredit Kurang Lancar
Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 3 bulan dari jangka waktu yang diperjanjikan.
3. Diragukan
Diragukan adalah kredit yang pengembaliannya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau 2 kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
4. Macet
Macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo yang telah diperjanjikan.

2.3.4 Prosedur pemberian Kredit

Menurut Mahmoeddin (2003:124) upaya prosedur tetap yang berlaku pada BPR dibuat lebih sederhana dan lebih ringkas, tanpa meninggalkan azas kehati-hatian (*prudential*).

Uraian pengajuan kredit dibutuhkan waktu dan tahapan sesuai dengan prosedur. Masing-masing BPR berbeda kecepatan birokrasinya ,apalagi dalam menganalisis suatu permohonan kredit diperlukan waktu yang cukup panjang, sementara sebagian nasabah sering mengajukan permohonan dalam waktu yang relatif pendek. Secara umum prosedur kredit secara runtun harus dipenuhi, agar kepentingan BPR dapat dijamin dengan baik. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan tertulis pada loket pendaftaran
2. Petugas BPR melakukan pencatatan pada register pendaftaran
3. Pejabat pemutus melakukan disposisi
4. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan administrasi apakah calon nasabah terdaftar dalam daftar hitam atau daftar kredit macet.

5. Petugas lapangan melakukan pemeriksaan *on the spot* atau langsung ke lapangan atas usaha nasabah
6. Petugas lapangan juga memeriksa kelengkapan atas barang agunan
7. Selanjutnya petugas lapangan memeriksa idantitas nasabah
8. Petugas analis kredit melakukan perhiitungan berdasarkan laporan keuangan dan hasil pemeriksaan lapangan
9. Pejabat pemutus kredit memberikan putusan berdasarkan usulan analis kredit
10. Petugas administrasi malakukan penyelesaian surat perjanjian kredit dan melegalisasikan di depan notaries
11. Petugas juga melakukan pengikatan secara hokum baranga agunan
12. Langkah terakhir adalah melakukan pencairan atau realisasi kredit.

Prosedur ini adalah prosedur standart, yang penting pelaksanaannya oleh petugas dilakukan dengan cepat dan tepat, agar tidak terlalu banyak meja yang dihadapi nasabah dan jangan sampai prosedur terlalu melelahkan dan memakan waktu.

2.4 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut, Arens (2008:370) mengemukakan bahwa pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP (2003:2) pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna;

- 1) menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- 2) menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- 3) meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- 4) mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- 5) meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.4.1 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan

Menurut pedoman standart sistem pengendalian internal bagi bank oleh direktorat penelitian dan perbankan bank indonesia pada Lamp. SE No.05/22/DPNP tanggal 23 september 2003, penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan meliputi:

1. Pengawasan Oleh Manajemen Dan Kultur Pengendalian

A. Pengawasan Oleh Manajemen

Dewan Komisaris dan Direksi harus ikut berperan aktif dalam penerapan pengendalian internal. Dewan komisaris berperan penting dalam tata kelola bank yang efektif karena mempunyai tanggung jawab akhir yang memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, dan mengesahkan serta mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan. Sementara dewan direksi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan strategi yang disetujui oleh dewan komisaris, memastikan bahwa pendelegasian

wewenang berjalan efektif, memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan dan tanggung jawab, dan menetapkan serta memantau efektivitas sistem pengendalian internal.

B. Kultur Pengendalian

Dewan komisaris dan direksi bertanggungjawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di bank.

2. Identifikasi Dan Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Suatu pengendalian Intern yang efektif mengharuskan bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai Resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran, penilaian tersebut harus mencakup semua resiko yang dihadapi, baik oleh resiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*).

3. Kegiatan pengendalian

A. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai bank, termasuk Direksi. kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan resiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai bank bahwa arahan dewan komisaris dan direksi telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkat fungsional sesuai struktur organisasi bank, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kaji ulang manajemen

Direksi bank dalam hal ini, secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja oprasional dari pejabat dan *staf* sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai.

2. Kaji ulang kinerja operasional

kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik dilaksanakan harian, mingguan, maupun bulanan. Kaji ulang tersebut meliputi menganalisis data oprasional yaitu dengan melakukan verifikasi rincian kegiatan transaksi dan kegiatan dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan.

3. Pengendalian sistem informasi

a. Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan otorisasi sesuai dengan ketentuan intern.

b. Pengendalian sistem informasi

kegiatan pengendalian sistem informasi digolongkan menjadi dua yaitu pengendalian umum meliputi sistem pengadaan dan

pemeliharaan software, pengamanan akses, serta pemeliharaan sistem aplikasi yang ada, dan pengendalian aplikasi terhadap program yang digunakan bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasikan secara benar.

4. Pengendalian aset fisik

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset bank, kegiatan ini meliputi pengamanan asset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan data.

5. Dokumentasi

Dokumen adalah objek fisik dalam transaksi yang berfungsi untuk menyimpan informasi atas transaksi, dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional bank secara aktual. Selain itu, dokumen tersebut harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik dan pengawas bank Indonesia.

B. Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, sistem pengendalian yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi

A. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi bank. Untuk menjamin data yang akurat dan konsisten proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala.

B. Sistem Informasi

Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha dan kondisi keuangan bank, selain itu sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, agar dapat mendukung tugas dewan komisaris dan direksi.

C. Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Sistem pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

5. Kegiatan pemantauan

a. Kegiatan pemantauan

Untuk terciptanya pengendalian internal yang efektif, Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern, serta memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi.

b. Fungsi SKAI

Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern. Pelaksanaan audit intern tersebut yang dilaksanakan oleh SKAI harus didukung oleh tenaga auditor yang independent, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.

2.4.2 Peran Pengendalian Internal Dalam Menjaga Kualitas Kredit

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya.

Menurut (Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP, 2003) “sistem pengendalian intern merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan suatu bank dan merupakan dasar bagi kegiatan operasional bank yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar. Sistem pengendalian intern dapat membantu pengurus dan pengelola bank menjaga aset bank, menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian”.

Sedangkan peran pengendalian internal dalam rangka menjaga kualitas kredit menurut (Zaini widya 2009).

“Pengendalian internal pemberian kredit merupakan suatu prosedur atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Pengendalian internal dapat berpengaruh terhadap kualitas kredit. Pengendalian internal dalam pemberian kredit sangat diperlukan agar dapat dilihat bagaimana praktek di lapangan mengenai pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku., setelah ditinjau bagaimana pemberian kredit yang dilakukan maka dapat diketahui bagaimana kualitas kredit tersebut yang pada umumnya dapat dilihat dari tingkat NPL.

2.5 Rerangka Pemikiran

Objek penelitian dari penulisan ini adalah PT.BPR Paramindo Abadi. Salah satu kegiatan pada PT. BPR Paramindo Abadi adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Setelah menetapkan objek penelitian maka langkah kedua adalah penetapan judul penelitian dan perumusan masalah penelitian. Langkah ketiga mempelajari dan memahami teori yang mendukung penelitian ini.

Setelah itu , Langkah keempat penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai proses pemberian kredit dengan objek penelitian ini yaitu pada PT. BPR Paramindo Abadi. Langkah kelima melakukan penelitian mengenai penengendalia internal pada sistem informasi akuntansi proses kredit yang terdapat pada PT. BPR Paramindo Abadi dan menganalisis hasil dari penelitian tersebut apakah sudah sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya, langkah terakhir dari penelitian ini yaitu memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis analisis pengendalian internal pada sistem

informasi akuntansi proses kredit pada PT BPR Paramindo Abadi dalam rangka meningkatkan kualitas kredit.

III Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengendalian Internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit. Lokasi penelitian dilakukan di BPR Paramindo Abadi yang beralamat di Jalan Cileduk Pertokoan Ciledug Centre Blok A/9 Larangan Utara Kota Tangerang. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2011.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, seperti wawancara sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang sumber yang telah ada (Uma Sekaran, 2006:61).

Data primer yang didapatkan penulis berupa hasil wawancara dengan pejabat yang bertanggung jawab dengan proses pemberian kredit. Sedangkan data sekunder yang didapatkan penulis dari pihak bank berupa sejarah singkat pendirian PT BPR Paramindo Abadi, sistem prosedur pemberian kredit, data peningkatan kredit. Selain itu, penulis mendapatkan data-data sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian melalui perpustakaan dan internet.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam melakukan pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

1) Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan ini, penulis memeriksa secara langsung obyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tema yang diambil dengan menggunakan teknik penumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian kredit yang merupakan obyek berkompeten yang menguasai dan bertanggung jawab atas masalah yang diteliti.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di bagian kredit yang meliputi proses permohonan kredit, pengelolaan kredit, penarikan kredit, dan pemantauan kredit , dengan cara mengamati proses penerapan pengendalian internal dan apakah terdapat pemisahaan tugas dalam tahapan pemberian kredit sehingga proses pemberian kredit sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

c. Riset Kepustakaan

Riset Kepustakaan digunakan untuk mencari buku-buku terkait dengan sistem pengendalian internal proses pemberian kredit agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

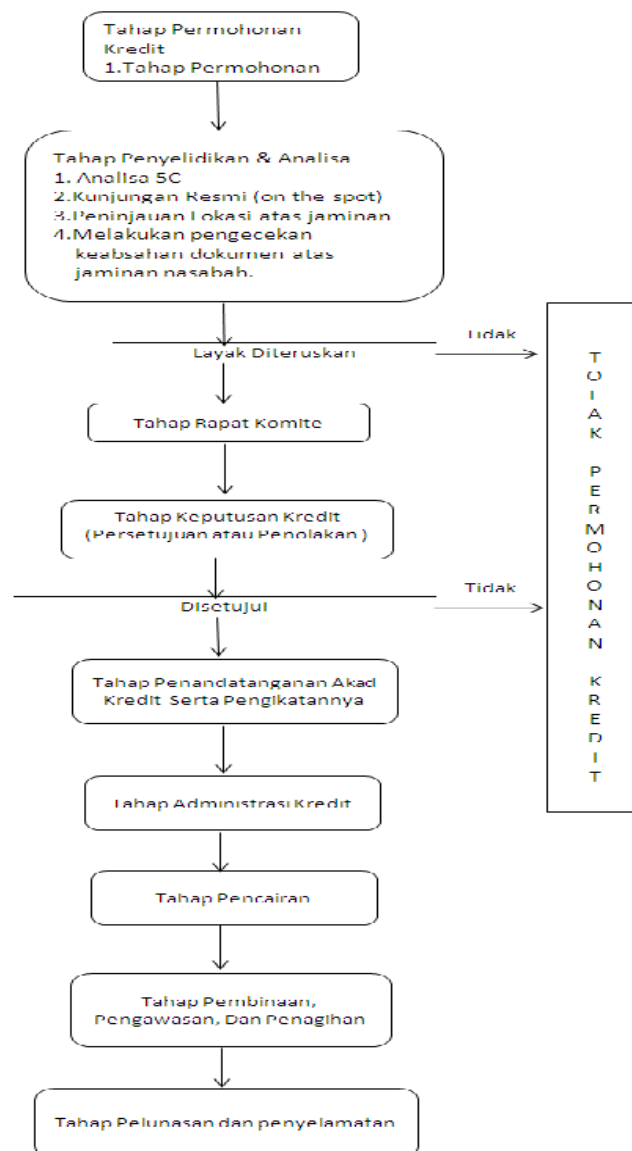
3.2.3 Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data-data ini akan dijadikan sebagai dasar analisis untuk membahas masalah yang diperoleh yang kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada dan untuk melihat apakah sistem pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit yang telah diterapkan pada PT. BPR Paramindo Abadi telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat menjaga kualitas dari kredit yang diberikan.

IV Analisis Dan Pembahasan

4.1. Proses Pemberian Kredit

Gambar 4.1 Proses pemberian Kredit



4.2. Kualitas Kredit PT.BPR Multi Para Mindo Abadi

Table 4.1 tingkat kualitas kredit

Tahun	2010	2009	2008	2007
Total Kredit yang diberikan	7.754.982	7.944.696	7.856.394	4.612.635
Kredit Yang Diberikan Kepada Pihak terkait	58.195	38.888	50.000	0
Kredit Yang Diberikan Kepada Pihak tidak terkait	7.696.787	7.905.808	7.806.394	4.612.635
Kualitas Kredit :				
Lancar	5.227.294	7.468.573	7.507.963	4.392.762
Kurang Lancar	1.689.820	152.669	148.418	31.379
Diragukan	223.315	195.289	100.928	95.473
Macet	614.553	128.165	99.085	93.021
Non Performing Loan (NPL)	32,59%	5,99%	4,43%	4,77%

Berdasarkan table diatas dapat diketahui, total kredit yang diberikan pada Bank Perkreditan Rakyat Multi Paramindo Abadi pada tahun 2007 sebesar Rp4.612.635.000 dengan kualitas kredit lancar sebesar Rp4392.762.000, kualitas kredit kurang lancar Rp 31.379.000, kredit diragukan Rp95.473.000, dan macet Rp93.021.000. Kemudian pada tahun 2008 terjadi peningkatan total kredit yang diberikan dibandingkan tahun seblumnya, total kredit yang disalurkan sebesar Rp7.856.394.000 dengan kualitas kredit lancar sebesar Rp7.507.963.000, kurang lancar Rp148.418.000, diragukan Rp100.928.000 dan kualitas kredit macet Rp99.085.000. Pada tahun 2009 total kredit yang disalurkan sebesar Rp7.944.696.000 kualitas kredit lancar sebesar Rp7.468.573.000, kualitas kredit kurang lancar Rp152.669.000, diragukan Rp195.289.000, dan kualitas kredit macet sebesar Rp128.165.000. Dan pada tahun 2010 total kredit yang diberikan sebesar Rp7.754.982.000 dengan kualitas kredit lancar Rp5.227.294.000, Rp1.689.820 kualitas kredit kurang lancar, Rp223.315 untuk kualitas kredit diragukan, dan kualitas kredit macet sebesar Rp614.553.000.

4.2.1 Analisis Pengendalian Internal Pada Sistem Informasi Akuntansi Proses Kredit Pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi

Dalam melakukan analisis sistem pengendalian internal pada Bank Perkreditan Rakyat Multi Paramindo Abadi, penulis menggunakan teori PBI mengenai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (Lamp. SE No.5/22/DPNP tanggal 29 september 2003). Didalam teori pengendalian internal Bank tersebut, terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian, identifikasi dan penilaian resiko, kegiatan pengendalian, sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Berikut adalah penerapan pengendalian internal proses kredit pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi.

4.2.2 Pengawasan Oleh Manajemen Dan Kultur Pengendalian

a. Pengawasan Oleh Manajemen

Pengawasan yang dilakukan direksi maupun komisaris dalam pengendalian internal proses kredit pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi adalah pada saat melakukan pertimbangan dan memutuskan pemberian kredit yang diajukan oleh nasabah. Setiap kredit yang akan diputuskan untuk disetujui atau ditolak harus melalui suatu rapat komite kredit yang anggotanya terdiri dari dewan direksi, kabag marketing, kabag

operasional/kredit, dan bagian marketing, dalam rapat komite kredit ini akan dibahas permohonan kredit yang diajukan nasabah dari segala aspek, seperti besar plafond kredit yang disetujui, besarnya bunga kredit, besarnya biaya provisi dan administrasi, jangka waktu kredit dan syarat-syarat kredit lainnya. Untuk jumlah plafond kredit tertentu akan diajukan kepada dewan komisaris untuk dimintakan persetujuan.

b. Budaya Pengendalian.

Untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai bank mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, PT. BPR Paramindo Abadi Memiliki Peraturan yang memuat kebijakan, standar dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada dalam organisasi. Peraturan tersebut mencantumkan kebijakan dan tata tertib yang harus dijalankan, serta sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bila terjadi pelanggaran.

4.2.3. Identifikasi Dan Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisi dan menilai resiko yang dihadapi untuk mencapai sasaran. Untuk meminimalkan resiko kredit yang tidak diinginkan, maka Bank Perkreditan Rakyat Multi Paramindo Abadi menyusun prosedur pemberian kredit. Perosedur pemberian kredit terdiri dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat memberikan kredit kepada nasabah/debitur, berupa ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur.

4.2.4 Kegiatan Pengendalian

a. Kegiatan Pengendalian

kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai bank bahwa arahan dewan komisaris dan direksi bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkat fungsional sesuai struktur organisasi bank, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi, Dewan Direksi setiap akhir tahun melakukan rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja bank, dalam rapat tersebut Dewan Direksi meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan *staf* mengenai kredit yang disalurkan, dan tingkat pengembalian kembali atas kredit yang disalurkan. Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dalam menyalurkan kredit kepada debitur.

2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang yang dilaksanakan SKAI pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi dilakukan secara mingguan yang meliputi verifikasi atas dokumen-dokumen kredit dan kelengkapan dokumen yang dijadikan sebagai jaminan kredit oleh debitur.

3. Pengendalian Sistem Informasi

A. Dalam melaksanakan prosedur otorisasi PT. BPR Multi Paramindo abadi sudah sesuai dengan ketentuan intern. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemberian kredit, setiap dokumen seperti formulir permohonan fasilitas kredit (FPFK), laporan analisa kredit (LAK), perjanjian kredit (PK) dan dokumen pengikatan jaminan dan kuasa (DPJDK) harus mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang.

B. Pengendalian sitem informasi

Informasi pada PT. BPR Multi Paramindo abadi yang berhubungan dengan data debitur seperti jumlah pinjaman pokok pinjaman, tanggal pinjaman, jumlah angsuran yang sudah dibayar, dan tanggal jatuh tempo kredit. Pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi menggunakan software *FOXPRO* dalam menyimpan data-data tersebut.

Untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasikan secara benar. Semua dokumen-dokumen sumber yang boleh di input ke dalam program komputer harus sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, selain itu setiap bulan kepala bagian oprasional/kredit malakukan pengecekan terhadap saldo yang terdapat pada kartu hutang, tanda bukti penerimaan kas (TBPK) dan catatan kredit yang ada di dalam software.

4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)

Dalam rangka melindungi dan mengamankan dokumen dan catatan yang berhubungan dengan kredit, pada Bank Perkreditan Rakyat Multi Paramindo Abadi semua arsip/dokumen/formulir yang terkait dengan kredit disimpan pada tempat penyimpanan jaminan yaitu dalam ruang khasanah (barankas). Selain itu, direksi mempunyai kebijakan bahwa bagian yang mempunyai akses terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit hanya bagian marketing. Dengan demikiian setiap dokumen disimpan dengan aman dan terlindungi dari catatan yang rusak, atau hilang yang dapat mengganggu proses kredit.

5. Dokumentasi

Untuk mendukung sistem pengendalian kredit pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi, setiap formulir-formulir seperti tanda bukti pengeluaran kas (TPK), tanda bukti penerimaan kas (TBPK), dan perjanjian kredit (PK) dibuat rangkap. hal tersebut dilakukan agar senantiasa tersedianya dokumen kredit untuk kepentingan pihak manajemen, auditor intern, dan otoritas pengawasan bank Indonesia.

b. Pemisahan Fungsi

Oleh karena terdapat kendala keterbatasan sumber daya manusia Pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi, pemisahan fungsi kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada proses pemberian kredit dimana bagian marketing memiliki peran yang sangat sentral, dimana bagian marketing yang bertugas mencari dan memasarkan kredit kepada debitur, diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan analisi kelayakan pemberian kredit tersebut, hal ini menyebabkan tidak efektifnya sistem pengendalian yang dilakukan dan akan menimbulkan terjadinya berbagai benturan kepentingan (*conflict of intrest*).

4.2.5 Sistem Akuntansi, Informasi Dan Komunikasi

a. Sistem akuntansi

Dengan adanya sistem komputerisasi terhadap semua transaksi yang terjadi, menyebabkan arus informasi dan komunikasi antar bagian semakin cepat. Dalam melakukan kegiatan posting bagian pembukuan/akuntansi tidak lagi melakukan secara manual, bagian akuntansi tinggal memproses secara komputerisasi kegitan posting, demikian juga dalam membuat laporan laba rugi, semuanya sudah dilakukan dengan bantuan komputerisasi.

Untuk menjamin data akuntansi yang keakuratan dan konsisten, setiap bulan kabag oprasional/kredit melakukan malakukan pengecekan terhadap pencatatan yang dilakukan bagian pembukuan.

b. Sistem Informasi

Informasi pada PT. BPR Multi Paramindo abadi yang berhubungan dengan data debitur seperti jumlah pinjaman pokok pinjaman, tanggal pinjaman, jumlah angsuran yang sudah

dibayar, dan tanggal jatuh tempo kredit. Pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi menggunakan software *FOXPRO* dalam menyimpan data-data tersebut.

Setiap data transaksi yang dilakukan debitur setiap bulannya di input kedalam software ini, sehingga data/informasi yang dihasilkan dapat menyajikan informasi debitur yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat mendukung tugas dewan komisaris dan direksi

c. Sistem Komunikasi

Komunikasi pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi terhadap debitur, dilakukannya melalui telpon, kunjungan langsung *on the spot* maupun monitoring administrasi, hal ini bertujuan untuk melakukan pembinaan/pengawasan terhadap kredit yang disalurkan kepada debitur.

4.2.6 Kegiatan Pemantauan

Kegiatan pemantauan kredit yang disalurkan pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi dilakukan pada saat kredit berjalan, aktivitas pengawasan terhadap usaha nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing dan kolektor pada saat melakukan penagihan pembayaran angsuran kredit kepada debitur.

Berdasarkan hasil analisa, Penerapan Pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit yang diterapkan pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi memuat hampir seluruh unsur-unsur dari pengendalian internal. Tetapi terdapat beberapa hal yang harus dilakukan langkah perbaikan dalam Pengendalian internal prosedur pemberian kredit yang diterapkan, terutama dalam hal pemisahan fungsi kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada proses pemberian kredit dimana bagian marketing memiliki peran yang sangat sentral, dimana bagian marketing yang bertugas mencari dan memasarkan kredit kepada debitur, diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan analisi kelayakan pemberian kredit tersebut, hal ini menyebabkan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit yang diterapkan tidak sesuai dengan teori yang ada dan dapat menimbulkan terjadinya berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

4.3 Analisis Pengendalian Internal Dalam Rangka Menjaga kualitas kredit.

Berdasarkan tujuan pengendalian internal yaitu untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Pengendalian internal proses pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Multi Paramindo Abadi adalah tidak sesuai dengan teori yang berlaku, sehingga peran pengendalian internal dalam menjaga kualitas kredit tidak berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Loan* periode 2007-2010 yaitu pada tahun 2007 jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp 4.612.635.000 sedangkan total *bad debt* sebesar 219.873.000 maka tingkat NPL sebesar 4,77%. Kemudian pada tahun 2008 terjadi penurunan NPL sebesar 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan terjadi peningkatan dalam jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp 3.243.759.000 sehingga total kredit yang disalurkan menjadi 7.856.394.000 dengan total *bad debt* sebesar Rp 348.431.000 sehingga didapat tingkat NPL sebesar 4,43%. Pada tahun 2009 tingkat NPL sebesar 5,99% dengan jumlah total kredit sebesar Rp7.944.696.000 dan total *bad debt* sebesar Rp 476.123.000 kemudian pada tahun 2010 terjadi peningkatan NPL yang signifikan dari tahun 2009 sebesar 26,6% dari tahun sebelumnya, sehingga total NPL menjadi 32,59%, dengan jumlah *bad debt* sebesar Rp 2.527.688.000 dan total kredit sebesar Rp 7.754.982.000

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan setiap tahun tingkat *Non Performing Loan* pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi mengalami peningkatan dari ketetapan bank Indonesia sebesar $\leq 5\%$ dari total portofolio kreditnya, walaupun pada tahun 2007 dan 2008 dibawah 5% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan bank Indonesia, namun pada tahun 2009 terjadi peningkatan dan 2010 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya pengendalian internal yang dilakukan PT.BPR dan perlu dilakukannya langkah perbaikan.

V. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan mengambil kesimpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses kredit dalam rangka menjaga kualitas kredit yang diberikan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Multi Paramindo Abadi. Adapun kesimpulan dari penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit yang diterapkan pada PT.BPR Multi Paramindo Abadi memuat hampir seluruh unsur-unsur dari pengendalian internal, hal tersebut dapat terlihat dari proses dan tahapan pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT.BPR Multi Paramindo. Namun terdapat beberapa hal-hal yang terdapat dalam sistem pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit pada PT.BPR Multi Paramindo yang perlu diperbaiki, khususnya pada pemisahan tugas.
- b. Pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit PT.BPR Multi Paramindo Abadi belum dilakukan sesuai dengan teori yang berlaku, karena bagian *marketing* yang bertugas untuk memasarkan produk bank seperti tabungan, deposito dan kredit, diberikan tanggung jawab untuk melakukan analisa permohonan kredit yang diajukan debitur, hal ini memungkinkan terjadinya resiko dan dapat menimbulkan terjadinya berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- d. Penerapan pengendalian internal pada PT.BPR Para Mindo Abadi belum mampu menjaga kualitas kredit yang diberikan, hal ini terlihat dari tingkat *bad debt* yang meningkat dari tahun 2007-2010 dan tingkat *Non Performing Loan* dari tahun 2007-2010 juga mengalami peningkatan, walaupun terjadi penurunan di tahun 2008 tetapi itu karena jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Disamping kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal proses kredit. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

5.2.2 Saran Bagi Instansi Terkait

- a. Penulis menyarankan sebaiknya PT.BPR Multi Paramindo Abadi melakukan langkah perbaikan dalam melakukan pengendalian internal pada proses pemberian kredit. Terutama dalam hal pemisahan fungsi, walapun terdapat kendala yaitu keterbatasan sumber daya, tetapi dalam hal menganalisa kelayakan kredit atas permohonan yang

diajukan calon debitur seharusnya tidak dilakukan oleh bagian marketing, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kredit.

- b. Penulis menyarankan dalam melakukan penilaian/analisa terhadap kelayakan kredit calon debitur, seharusnya menekankan juga aspek penilaian terhadap karakter, dan kondisi ekonomi ketika melakukan analisa, selain aspek modal dan jumlah jaminan yang diberikan dari debitur.
- c. Penulis menyarankan dalam hal pemantauan terhadap kredit yang telah disalurkan, seharusnya pemantauan yang dilakukan oleh pihak manajemen lebih ditingkatkan. Walaupun evaluasi dan pengkajian terhadap kredit yang disalurkan telah dilakukan, tetapi evaluasi dan pengkajian tersebut hanya dilakukan pada akhir tahun yakni dalam rapat kerja, seharusnya setiap bulan pihak manajemen melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap kredit yang telah direalisasikan, hal tersebut dilakukan agar kredit yang disalurkan sesuai dengan keinginan bank yaitu lancar dan tidak macet. selain itu dengan dilakukannya pengawasan yang intensif terhadap fasilitas kredit yang disalurkan, dapat mendeteksi secara dini kemungkinan resiko yang timbul dan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan dengan cepat.

5.2.2 Saran Bagi Pembaca Hasil Penelitian

- a. Selain mencoba memberikan beberapa masukan kepada PT.BPR Multi Paramindo abadi, penulis menyarankan kepada peneliti yang akan melakukan riset selanjutnya diharapkan untuk memperluas jangkauan penelitian untuk tidak hanya melakukan penelitian pada pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi proses pemberian kredit, namun bisa menjadikan pengendalian internal proses penghimpunan dana sebagai bahan penelitian sehingga dapat menggambarkan pengendalian internal perusahaan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alton, J Jones. 2005. *Evil Money, Evil Credit*. USA: High Tower Book.
- Arbi, M. Syarif, Haji. 2003. *Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank* Jakarta: Djambatan
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance, Pendekatan Terintegrasi Jilid 1, Edisi Keduabelas*. Jakarta: Erlangga.
- Bank Indonesia Banking Boklet. 2009.
- David, Bean. 2011. *Everyday Finance*. USA.
- Delley, Deborahh K. 2008. *Essentials of Banking*. Jhonson Willey & Son, inc., Hoboken New Jersey.
- Firdaus, Rahmat dan Maya Aryanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan Cetakan pertama*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi akuntansi*. Jakarta: PT Salemba Empat.

- Iskandar, Syamsul Iskandar. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama.
- Jusup Haryono. 2008. *Auditing*. PT. Pentamuda Karya Bangsa Cetakan Pertama.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan. Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lampiran. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 september 2003*.
- Mahmoeddin, H.AS Quantum. 2003. *Kredit Macet Keluhan Nasabah Derita BPR*. Bandung: Expert Bandung.
- Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. 2002. *Manajemen perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Mulyadi. 2009. *Auditing. Edisi ke-6*. Yogyakarta: PT Salemba Empat.
- Pedomann Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum Lamp. SE No.5/22/DPNP tanggal 29 september 2003
- Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes. 2007. *Bank And Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. 2010. *Pedoman dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Edisi II. Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simongkir.O.P. 2004. *Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank. Cetakan kedua*. Bogor: Gahalia Indonesia Bogor selatan.
- Suparmono, Gatot. 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta.
- Suyatno, Thomas, Drs. Dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkereditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Teguh Pudjo Muljono. 2001. *Manajemen Perkreditian Bagi Bank Komersi*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.